

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Antasari, R., & Fauziah. (2018). *Hukum Bisnis*. Jawa Timur: Setara Press.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Fuady, M. (2018). *Pengantar Hukum Bisnis “Menata Bisnis Modern di Era Global”*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Iskandar, R. (2022). *Hukum Jaminan dalam Praktik*. Yogyakarta: Liberty
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press.
- Hadjon, P. M. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hartono. (2010). *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, (1995), *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notohamidjojo. (2016). *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Utrecht. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia: Bandung.

### **Jurnal/Artikel**

Anggraini, Y. (2024). Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik Dan Kredibilitasnya Dalam Pembuktian Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(8).

Aprilia, S. et al. (2025). Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(5), 1-8.

Apsari Hadi I. G. A. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 2620.

Ardhya Si Ngurah, R. A. (2025). KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT SECARA LISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 139/PDT.G/2022/PN SGR). *Jurnal Locus Delicti*.

Armanda, D. (2024). Analisis Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis dalam Melaksanakan Suatu Transaksi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 62-68.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

Dantes Komang Febrinayanti, K. W. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.g.s/2024/PN.sgr). *JURNAL LOCUS DELICTI*, 141.

Dantes Komang Febrinayanti, N. K. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG). *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 64.

Dimpudus, K. L. et al. (2021). Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Financial Lease Serta Pelaksanaan Hukumnya. *Lex Privatum*, 9(12).

Efendi, M. R. (2024). Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik dalam Persidangan Peradilan Perdata melalui E-Court. *Hukum Bisnis*, 8(3), 1389-1402.

- Hidayanto, N. J. et al. (2024). Analisis Konsep Perjanjian (NOOMINAT) Bernama dalam Perspektif Hukum Perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 2(4), 475-481.
- Indriyansyah, F., Pratiwi, I. A., Khasanah, M., & Wahyono. Analyze The Use of Learning Technology to Increase Students' Interest in Learning. *SHEs: Conference Series*. 6(1): 235-240.
- Jabalnur, et al. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Hukum Uang Paksa (Dwangsom) Pada Putusan Perkara Perdata Terkait Putusan Dengan Pembayaran Sejumlah Uang. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 213-225.
- Kakisina, P. H. et al. (2023). Keabsahan Kekuatan Pembuktian Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4).
- Katiandagho, F. V. et al. (2023). Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado. *Lex Privatum*, 11(5).
- Mangku, D. G. S., Yulianti, N. P. R., Dana, K. B. R. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi WNI di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Hukuman Mati TKI di Arab Saudi, Tuti Tursilawati 2018). *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 5(2).
- Mamesah, M. et al. (2022). Sistem Transaksi Elektronik dalam Perjanjian Jual Beli melalui Media Online. *Lex Privatum*, 10(1), 69-78.
- Mariana, D. et al. (2022). Penyitaan Aset sebagai upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JlIP*, 5(8), 2928-2935.
- Negara, C. P. et al. (2022). Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang. *Diponegoro Private Law Review*, 9(2), 145-158.
- Okky Irawan, S. N. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Volume. 2 Nomor. 1*, 24.
- Perangin-angin, D. et al. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238-253.

- Rohaedi, E. et al. (2023). Kedudukan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 121-129.
- Samodra, M. I., & Mumpuni. (2025). Analisis Sita Jaminan Dalam Sengketa Waris Dan Penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1-24.
- Satiah & Amalia. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, 36(2), 126-139.
- Senda, V. N. et al. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian. *Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 169-182.
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Tujuan Perjanjian Baku Mewujudkan Keadilan Para Pihak. 9(1), 1-54.
- Sodiq, J., & Kautsar. (2022). Perbandingan Sumber-Sumber Hukum dan Karakteristiknya dalam Kajian Syariah dan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 182-206.
- Sugastuti, N. Y. (2022). Keabsahan Klausula Pengesampingan Pasal 1266 Kuhperdata Sebagai Dasar Pemutusan Kontrak Secara Sepihak (Studi Terhadap Doktrin Hukum Dan Putusan Pengadilan). *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(3), 776-786.
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. 8(1).
- Widjaja, G. et al. (2019). Wanprestasi, Kegagalan Transaksi Dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *Cross-border*, 2(1), 193-205.
- Winatha, I. G. M. Y., et al. (2023). Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Yustitia*, 17(1), 75-81.
- Windari Artha Ratna, A. A. (2025). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/PDT.G.S/2021/Pn Trt Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Arisan Online. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1214.
- Windari Artha Ratna, I. P. (2026). Juridical Implications of Constitutional Court Decision Number 78/PUU-XXI/2023 on Freedom of Expression in Indonesia. *International Jurnal Of Business, Law, and Education*.

### **Undang-Undang / Peraturan Perundangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps.

